

**PENGARUH SISTEM PELAPORAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (SURVEI PADA DESA-DESA DI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG)**

**Ni Made Meisi Cahyani<sup>1</sup>**

**Anak Agung Ketut Agus Suardika<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

**ABSTRACT**

*In the management of village funds it is demanded that there be an aspect of good governance in which one of the pillars is accountability. The purpose of the study was to determine the effect of the reporting system, community participation and understanding of government regulations on the village fund management accountability. This research was conducted in the villages in the Abiansemal sub-district of Badung Regency. Method of determining the sample with a purposive sampling method. Data collection is done by distributing questionnaires. While the data analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of this study indicate that the reporting system, community participation and understanding of government regulations have a positive and significant effect on the accountability of the village fund management. This shows the better the reporting system, community participation and understanding of government regulations the better accountability of the village fund management carried out by village official. Based on the above conclusions, it is suggested that there is a need for coaching or training of the village government for an understanding of village fund management so that in the future a training program can be made or it can also be submitted to the local government.*

**Keywords:** *reporting system, community participation, understanding, accountability and village funds.*

**PENDAHULUAN**

Fokus utama pembangunan Indonesia saat ini adalah desa. Pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah upaya peningkatan pembangunan di sektor desa yang kemudian dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor desa, membiayai pelaksanaan kegiatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kekhawatiran terhadap kesiapan desa dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut, karena jumlah dana yang diperoleh cukup besar. Kasus korupsi di desa Baha Kabupaten Badung, Perbekel Desa Baha menggunakan dana APBDesa lebih dari Rp 1 Milyar untuk

biaya berobat sakit jantung dan biaya hidup (bali.polri.go.id) adalah bukti kurangnya tanggungjawab desa. Sehingga, akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat serta menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa mengakibatkan pertambahan desa baru. Namun, desa-desa baru tersebut dinilai tidak wajar karena berdasarkan laporan yang diterima terdapat desa yang tidak berpenduduk, namun mendapatkan guyuran dana dari pemerintah pusat (tirto.id).

Dengan adanya dana desa dan ditambah dengan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung serta di Kecamatan Abiansemal terdapat sejumlah desa baru hasil dari pemekaran yang memperoleh dana desa maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah desa telah memanfaatkan dana-dana tersebut dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa – Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung) “

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?
3. Apakah pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta mampu memberikan semacam kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sebagai pertimbangan dan evaluasi serta dapat saling bersinergi agar lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sehingga semakin meningkatkan pembangunan desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling, 1976 menyebutkan kaitan antara *principal* yang memberi wewenang kepada *agent* untuk melakukan atau membuat suatu keputusan yang baik menurut *principal*. Dalam sektor publik, pemerintah (*agent*) diberikan kewenangan dan mempunyai tanggungjawab memberikan informasi yang berguna bagi (*principal*) masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah lainnya.

## Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi yang dikemukakan oleh ABP Statement No. 4 dalam Smith Skousen (1995 : 3) “Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang fadalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.”

## Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Publik menuntut lembaga-lembaga publik bekerja secara tanggung jawab dan transparan. Akuntansi sektor publik menyajikan informasi keuangan yang sumbernya berasal dari publik yang kemudian pertanggungjawaban pengelolaannya memerlukan tranparansi dan akuntabilitas kepada publik.

## Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:3) menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yaitu : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah disepakati sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala”. Pemerintah desa harus bertanggungjawab pada saat mengelola dana desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## Keuangan Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan sebagai pendanaan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan desa, serta pelayanan masyarakat.

## Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan yang menyajikan sistem pertanggung-jawaban dari bawahan kepada atasan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya.

## Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Mahayani (2017), partisipasi masyarakat memiliki tiga sifat yang penting yaitu; pertama, partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk mendapatkan fakta tentang keadaan, kebutuhan dan perilaku masyarakat setempat; kedua, apabila masyarakat dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan pembangunan, mereka akan lebih percaya pada program pembangunan dan ketiga, mendorong partisipasi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sensitifitas dalam mengelola dana desa yang rawan terhadap kecurangan.

## Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah

Pemahaman merupakan suatu cara seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Pemahaman merupakan keinginan seseorang dalam menguraikan dengan baik suatu materi yang dikuasai dan kemudian menafsirkan materi tersebut dengan benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi panduan untuk menyatukan pendapat antara pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Pemahaman pemerintah desa dapat memberikan dampak pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## Penelitian Sebelumnya

Untuk memperluas bahan penelitian, penulis mendapat acuan dari penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, antar lain :

1. I Made Agus Suma Arta (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila sitem pelaporan dan partisipasi masyarakat semakin baik dapat mengakibatkan akuntabilitas dana desa di Kabupaten Buleleng semakin baik.
2. Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi (2019) dalam penelitiannya memperoleh bukti empiris pengaruh partisipasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Umi Pratiwi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor pemahaman tentang peraturan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. I Nyoman Judarmita (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung akan semakin baik apabila sistem pelaporannya semakin baik.
5. Novindra Dwi (2017) dalam penelitiannya yang menunjukkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

## Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perumusan dua variabel yang dapat di uji secara empiris berdasarkan teori yang melandasinya. Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

### Pengaruh Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 prosedur pencatatan tentang standar akuntansi pemerintahan diantaranya meliputi mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan serta melaporkan. Jadi, sistem pelaporan dapat menggambarkan alur pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan. Sehingga sistem pelaporan yang baik akan tercipta, yang kemudian dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja manajemen dalam pengelolaan anggaran. Menurut I Made Agus Suma Arta (2019), sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari uraian di atas, dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **H1 : Sistem Pelaporan berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### Pengaruh Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, masyarakat merupakan unsur terpenting. Partisipasi masyarakat dijadikan alasan utama karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian Agus Suma (2019) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meminimalisir penyimpangan di desa dengan cara melibatkan masyarakat di dalamnya merupakan salah satu cara yang digunakan. Sehingga dari uraian diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

### **H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Soekidjo (2017) pemahaman peraturan pemerintah merupakan satu cara seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Penelitian Umi Pratiwi (2018), menunjukkan pemahaman tidak berpengaruh dalam akuntabilitas dana desa, Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi sehingga meningkatkan pemahamannya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

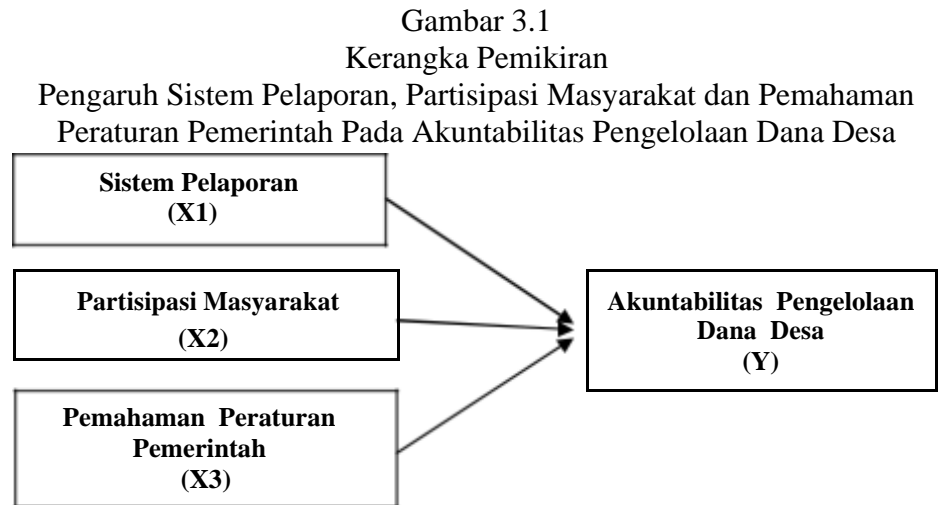
**H3 : Pemahaman Peraturan Pemerintah tidak berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, karena desain survei dalam penelitian kuantitatif dapat mengatur sampel atau populasi untuk mendeskripsikan karakteristik dari sampel dan populasi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data pimer dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Untuk memudahkan memahami dan mengartikan dari penelitian ini maka dibuat dalam kerangka pemikiran seperti pada Gambar 3.1 berikut ini.





Menurut Sugiyono (2012 : 59) menjelaskan mengenai pengertian dari variabel yaitu : “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel sebagai berikut :

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang memberi pengaruh timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah :

1. Sistem pelaporan (X1) merupakan cara yang dapat menggambarkan alur pertanggungjawaban dari bawahan keyatasan yang kemudian dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja manajemen dalam mengelola keuangan.
2. Partisipasi masyarakat (X2) merupakan alat yang digunakan untuk mempengaruhi keberhasilan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
3. Pemahaman (X3) adalah proses atau keinginan menjelaskan dengan benar tentang materi yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel bebas, sehingga variabel terikat dalam penelitian ini yaitu, Akuntabilitas (Y) adalah kewajiban perangkat desa (*agent*) untuk memberikan informasi semua pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Sugiyono (2012:115) menjelaskan mengenai pengertian dari populasi yaitu : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran populasi adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Menurut Sugiyono (2012:116), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling (non-probability sampling)*. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2012:122), teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang desanya memperoleh dana desa.
2. Perangkat desa yang termasuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki masa jabatan minimal 1 tahun.

4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang aktif bekerja atau sedang tidak dalam masa cuti.
5. Perangkat desa bukan PTPKD yang memiliki wewenang dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dana desa yang menduduki jabatan kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Adapun proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terdapat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Metode Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Seluruh perangkat desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang desanya memperoleh dana desa	382
2	Perangkat desa yang tidak termasuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).	(292)
3	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki masa jabatan kurang dari 1 tahun	(38)
4	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sedang dalam masa cuti.	(2)
5	Perangkat desa bukan PTPKD yang memiliki wewenang dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.	36
	<b>Total</b>	<b>86</b>

Sumber: Data diolah, 2020

Dari penentuan sampel di atas dapat diperoleh responden dari masing – masing desa, terdapat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2  
Jumlah Responden

No	Nama Desa	Jabatan	Jumlah Responden
1	Darmasaba	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
2	Sibang Kaja	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan	5
3	Sibang Gede	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
4	Jagapati	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
5	Angantaka	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
6	Sedang	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
7	Mambal	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan	5
8	Abiansemal	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan	6
9	Bongkasa	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan	5
10	Taman	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan	4
11	Blahkiuh	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan	7
12	Ayunan	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan	7
13	Sangeh	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Urusan Perencanaan	5
14	Punggul	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Pelayanan	4
15	Mekar Bhuwana	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan	7
16	Dauh Yeh Cani	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan	3
17	Selat	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Urusan Perencanaan	4
18	Bongkasa Pertiwi	Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala Seksi Kesejahteraan	4
	Total		86

Sumber : Data diolah, 2020

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber atau responden berkaitan dengan aspek-aspek penting yang berhubungan dengan variabel penelitian (Wahyudin, 2015: 130). Bobot penilaian dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* dengan 5 pilihan jawaban, yaitu 5 Sangat Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3 Kurang Setuju (KS), 2 Tidak Setuju (TS), dan 1 Sangat Tidak Setuju (STS).

#### Teknik Analisis Data

Setelah diperolehnya data dari berbagai sumber yang terkait, maka data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diantaranya; uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model, dan uji hipotesis (uji t).

#### Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang telah diperoleh serta tidak untuk memberikan hasil akhir yang berlaku umum. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data statistik.

#### Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat - syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dilakukan sebelum data diolah untuk mengetahui apakah data yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak dalam mendapatkan hasil penelitian.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan metode VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghozali, 2006).

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual satu penelitian ke penelitian yang lainnya. Jika varian dari residual tetap maka dapat dikatakan homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui di dalam model regresi apakah terdapat korelasi antar variabelnya. Menurut Ghozali (2011), perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis.

#### Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi R<sup>2</sup> untuk mengetahui kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai R<sup>2</sup> mendekati satu artinya kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen hampir sempurna.

#### Uji-t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak dengan cara membandingkan nilai dari statistik t dengan titik kritis dalam tabel.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji model regresi variabel independen kuantitatif atau kualitatif pada variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

b<sub>1</sub>-b<sub>2</sub>-b<sub>3</sub> = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Sistem Pelaporan

X<sub>2</sub> = Partisipasi Masyarakat

X<sub>3</sub> = Pemahaman Peraturan Pemerintah

e = Standard error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang termasuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki masa jabatan minimal 1 tahun serta aktif bekerja atau sedang tidak dalam masa cuti dan perangkat desa bukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang memiliki wewenang dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang menduduki jabatan kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Untuk mengetahui instrument penelitian handal atau reliabel dilakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai *cronbach alpha* yang di atas 0.60. Hasil uji reliabilitas terdapat pada tabel 4.1

Tabel 4.1  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem pelaporan	0.928	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.877	Reliabel
Pemahaman Peraturan Pemerintah	0.675	Reliabel
Akuntabilitas]Pengelolaan]Dana]Desa	0.967	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan SPSS,2020

Dapat dilihat dari tabel 4.1 seluruh instrumen penelitian yang digunakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* di atas 0.06

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono 2017;125). Syarat validitas apabila memenuhi batas minimum yaitu  $r=0,3$ . Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka setiap butir pertanyaan dalam kuesioner harus memiliki koefisien korelasi  $>0,3$ . Apabila koefisiensi korelasi  $<0,3$  maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid (Jogiyanto,2007). Hasil dari tiap pertanyaan dalam kuesioner ditunjukkan oleh nilai *person correlation* di atas 0,3 sehingga dapat dikatakan pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. Hasil validitas dapat dilihat pada tabel 4.2



Tabel 4.2  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Ket
Sistem pelaporan (X1)	Pernyataan 1 s/d 6	0.875; 0.883; 0.901; 0.816; 0.841; 0.831	Valid
Partisipasi Masyarakat(X2)	Pernyataan. 1 s/d 7	0.820; 0.699; 0.722; 0.703; 0.843; 0.808; 0.787	Valid
Pemahaman Peraturan Pemerintah(X3)	Pernyataan. 1 s/d 6	0.706; 0.757; 0.506; 0.676; 0.526; 0.776	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Penyataan 1 s/d 33	0.731; 0.734; 0.545; 0.746; 0.831; 0.805; 0.596; 0.748; 0.837; 0.832; 0.440; 0.309; 0.812; 0.806; 0.847; 0.357; 0.731; 0.795; 0.784; 0.769; 0.842; 0.687; 0.706; 0.701; 0.759; 0.754; 0.780; 0.715; 0.797; 0.697; 0.807; 0.861; 0.765	Valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS,2020

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang telah diperoleh serta tidak untuk memberikan hasil akhir yang berlaku umum. Hasil Statistik deskriptif terdapat pada tabel 4.3

Tabel 4.3  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	86	24.00	30.00	26.9302	2.54277
X2	86	23.00	35.00	29.4186	3.17514
X3	86	22.00	30.00	25.9419	2.15491
Y	86	129.00	165.00	145.5000	12.39616
Valid N (listwise)	86				

Sumber: Hasil Olahan SPSS,2020

Berikut ini merupakan hasil deskripsi umum berdasarkan Tabel 4.3. Nilai minimum dari variabel sistem pelaporan (X1) sebesar 24.00 dan nilai maksimumnya sebesar 30.00 dan nilai rata-rata sebesar 26.9302 dengan standar deviasi sebesar 2.54277. Variabel partisipasi masyarakat nilai minimumnya sebesar 23.00 dan nilai maksimumnya 35.00 serta nilai rata rata sebesar 29.4186 dengan standar deviasi sebesar 3.17514. Variabel pemahaman peraturan pemerintah memiliki nilai minimum

sebesar 22.00 dan nilai maksimum sebesar 30.00. Nilai rata-rata sebesar 25.9419 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 2.1549. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 129.00 dan nilai maksimum sebesar 165.00. Nilai rata-rata sebesar 145.5000 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 12.39616.

#### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui model regresi memiliki korelasi atau tidak antar variabelnya. Apabila nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF) di atas 10% maka model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas terdapat dalam tabel 4.4

Tabel 4.4  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.083	10.087		2.685	0.009		
	X1	1.270	0.535	0.263	2.371	0.020	0.354	2.824
	X2	1.514	0.332	0.391	4.566	0.000	0.593	1.687
	X3	1.529	0.618	0.268	2.472	0.016	0.371	2.698

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 hasil multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel di atas 10% (X1=0.354; X2=0.593; X3=0.371) dan nilai VIF di bawah 10 (X1=2.824; X2=1.687; X3=2.698) sehingga tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya dengan uji Glejser membandingkan nilai absolut residual jika nilai signifikannya di atas 0.05 artinya pada model regresi tersebut tidak ada heteroskedastisitas. Dari pengujian X3 nilai signifikannya di bawah 0.05 ( $X_3=0.032$ ) maka kemudian dilakukan outlier. Outlier dilakukan dengan mengeluarkan 2 (dua) buah data yang dianggap memiliki sebaran yang jauh dari data yang lain. Hasil pengujian heteroskedastisitas sebelum dilakukan outlier terdapat dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5  
 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	9.205	6.097		1.510	0.135
1 X1	0.595	0.320	0.331	1.857	0.067
X2	0.059	0.201	0.041	0.292	0.771
X3	-0.798	0.366	-0.376	-2.181	0.032

a. Dependent Variable: Abs Ut  
 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Hasil setelah outlier menunjukkan signifikansi  $X_1=0.187$ ,  $X_2=0.970$  dan  $X_3=0.174$  di atas 0.05 sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas setelah dilakukan outlier ada pada tabel 4.6

Tabel 4.6  
 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.750	5.743		1.349	0.181
1 X1	0.406	0.305	0.247	1.332	0.187
X2	-0.007	0.189	-0.005	-0.038	0.970
X3	-0.483	0.352	-0.249	-1.372	0.174

a. Dependent Variable: Abs Ut  
 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

### Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji instrumen dalam penelitian telah berdistribusi secara normal dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alpha (>0.05). Hasil dari uji normalitas terdapat dalam tabel 4.7

Tabel 4.7  
 Hasil Uji Normalitas

#### One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	E-7
	Std. Deviation	7.29904880
	Absolute	0.069
Most Extreme Differences	Positive	0.057
	Negative	-0.069
Kolmogorov Smirnov Z		0.636
Asymp Sig (2-tailed)		0.813

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Nilai signifikan dari *unstandardized residual* pada hasil uji statistik 0,813 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

### Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Karena variabel dalam penelitian ini lebih dari dua maka digunakan *Adjusted R-Square*. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu artinya kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen hampir sempurna. Hasil dari uji koefisien determinasi terdapat dalam tabel 4.8

Tabel 4.8  
Hasil Koefisien Determinasi

<b>Model Summary</b>				
Model.	R.	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.808 <sup>a</sup>	0.652	0.639	7.43465

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  
 Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil pengujian angka Adjusted R-Square yaitu 0,639 artinya variabel independen menjelaskan sebesar 63,9% variabel dependen dan sisanya 36,1% dijelaskan oleh variabel lainnya.

### Hasil Uji Anova (*f-test*)

Uji Anova atau *f-test* digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji anova atau *f-test* terdapat pada tabel 4.9

Tabel 4.9  
Hasil Uji Anova atau *F-Test*

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8301.071	3	2767.024	50.060 0.000 <sup>b</sup>
	Residual	4421.917	80	55.274	
	Total	12722.988	83		

a. Dependent Variable: Y  
 b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil Olahan SPSS,2020

Hasil dari uji anova menghasilkan  $F_{hitung}$  50.060 yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan signifikansi 0.000 di bawah 0.05 sehingga model regresi dikatakan layak.

### Hasil Uji t

Untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak maka dilakukan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10  
 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27.083	10.087		2.685	0.009
	X1	1.270	0.535	0.263	2.371	0.020
	X2	1.514	0.332	0.391	4.566	0.000
	X3	1.529	0.618	0.268	2.472	0.016

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: Hasil Olahan SPSS,2020

Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil uji t yaitu variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Koefisien parameter untuk variabel X1=1.270, X2=1.514 dan X3=1.529 dengan tingkat signifikansi untuk variabel X1=0.020, X2=0.000 dan X3=0.016 dengan tingkat signifikan yang di bawah 0.05 maka variabel X1,X2 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel bebas. Dalam penelitian ini, teknik analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui

ketergantungan variabel terikat akuntabilitas (Y) dengan variabel bebas sistem pelaporan (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan pemahaman peraturan pemerintah (X3). Analisis ini dikerjakan dalam bantuan program SPSS. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 27.083 + 1.270X_1 + 1.514X_2 + 1.529X_3$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas

X<sub>1</sub> = Sistem Pelaporan

X<sub>2</sub> = Partisipasi Masyarakat

X<sub>3</sub> = Pemahaman Peraturan Pemerintah

e = Standard error

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a = 27.083 artinya apabila X<sub>1</sub> (sistem pelaporan), X<sub>2</sub> (partisipasi masyarakat) dan X<sub>3</sub> (pemahaman peraturan pemerintah) konstan, maka Y (akuntabilitas) akan mengalami peningkatan sebesar 27.083%

b<sub>1</sub> = 1.270 artinya apabila variabel X<sub>1</sub> (sistem pelaporan) bertambah sebesar 1%, maka variabel Y (akuntabilitas) akan bertambah sebesar 1.270% dengan syarat X<sub>2</sub> (partisipasi masyarakat) dan X<sub>3</sub> (pemahaman peraturan pemerintah) konstan.

b<sub>2</sub> = 1.514 artinya apabila variabel X<sub>2</sub> (partisipasi masyarakat) bertambah sebesar 1%, maka variabel Y (akuntabilitas) akan bertambah sebesar 1.514% dengan syarat X<sub>1</sub> (sistem pelaporan) dan X<sub>3</sub> (pemahaman peraturan pemerintah) konstan.

b<sub>3</sub> = 1.529 artinya apabila variabel X<sub>3</sub> (pemahaman peraturan pemerintah) bertambah sebesar 1%, maka variabel Y (akuntabilitas) akan bertambah

sebesar 1.529% dengan syarat X1 (sistem pelaporan) dan X2 (partisipasi masyarakat) konstan.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan. Berikut ini pembahasan dari hasil pengujian hipotesis.

#### Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau kata lain hipotesis pertama di terima, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan meningkat apabila sistem pelaporannya juga meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Agus Suma (2019) yang menyatakan sistem pelaporan memberikan pengaruh yang positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Judarmita (2017) menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Sistem pelaporan dapat menggambarkan suatu organisasi dalam melakukan tanggungjawabnya.



## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau kata lain hipotesis kedua di terima. Dalam hal ini mendukung teori keagenan. Sehingga partisipasi masyarakat berperan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Julia (2018) yang menyebutkan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Agus Suma (2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang positif, semakin baik partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau kata lain hipotesis ketiga di tolak. Artinya, pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sependapat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Umi Pratiwi (2018), dalam penelitiannya pemahaman tidak mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Temuan lain dari Novindra (2017) juga menyatakan pemahaman perangkat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga, dari

sebaran kuesioner, responden menilai dalam melaksanakan pengelolaan dana desa haruslah mengetahui isi dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa memberikan pendampingan dalam setiap pengambilan keputusan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menguji sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan 86 responden dari 18 desa yang memperoleh dana desa. Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya, akuntabilitas akan meningkat apabila sistem pelaporan yang diterapkan baik.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya, apabila masyarakat ikut aktif terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.
3. Pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Artinya, semakin perangkat desa memahami peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa maka semakin baik akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran yaitu berdasarkan pernyataan kuesioner perlu adanya pembinaan atau pelatihan pemerintah desa untuk pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang kedepannya dapat dibuat program pelatihan atau juga dapat mengajukan pada pemerintah daerah. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat kekurangan terkait dengan variabel bebas. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.639 yang berarti 63,9% variabel dependen menjelaskan variabel independen, dan 36,1% dijelaskan oleh variabel lainnya. Maka dari itu, untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat menjelaskan lebih detail tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widyatama. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-20
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Badung Tentang Kabupaten Badung Dalam Angka 2019
- Muhammad Ismail. 2016. *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Volume XIX No. 2, Agustus 2016. ISSN 1979 - 6471
- Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 Vol. 26.2. Februari (2019) 1269-1298
- Novindra Dwi. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang. ISSN 2407-9189
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Saputro, Amin, dan Junaidi. 2018. Hubungan, Pemahaman, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, *Value For Money Terhadap Good Governance*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-JRA Vol. 07 No. 11 Agustus 2018
- Sugiarti. 2017. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*.

Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju *Sustainable Business Practice*.ISSN-2252-3936

Tirto.id. 2019. "Benarkah Dana Desa Memicu Desa Fiktif yang Dikeluhkan Sri Mulyani?". <https://tirto.id/benarkah-dana-desa-memicu-desa-fiktif-yang-dikeluhkan-sri-mulyani-eld1>. Diunduh tanggal 12 Januari 2020

Tribun-Bali. 2019. "Korupsi Dana Desa, Kades Baha Divonis 4,5 Tahun dan Harus Kembalikan Uang Negara Rp 1 M". <http://bali.tribunnews.com/2019/02/14/korupsi-dana-desa-kades-baha-divonis-45-tahun-dan-harus-kembalikan-uang-negara-rp-1-m>. Diunduh tanggal 21 Agustus 2019

Umi Pratiwi.2018. *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 2018, 429-44. ISSN:2541-061X(Online).ISSN:2338-1507(Print).  
<http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa